

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Tiongkok dalam mencapai keamanan energi melalui *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) pada periode 2015–2025 dengan menggunakan kerangka konseptual lima dimensi keamanan energi yang dikemukakan oleh Daojiong Zha. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa CPEC merupakan instrumen strategis multidimensi dalam arsitektur keamanan energi nasional Tiongkok, meskipun tingkat relevansi dan efektivitasnya bervariasi di setiap indikator. Kelima indikator tersebut memberikan lensa analitis yang sistematis untuk membedah kompleksitas upaya Tiongkok, mulai dari diversifikasi rute pasokan, peningkatan ketersediaan fisik, pengendalian biaya distribusi, hingga transformasi menuju keberlanjutan energi jangka panjang.

Pertama, dalam *security of supply*, CPEC terbukti memberikan kontribusi yang paling konkret dan terukur terhadap keamanan energi Tiongkok. Pembangunan jalur darat Gwadar-Kashgar yang memangkas jarak tempuh dari 12.000 km menjadi 3.000 km dan waktu pengiriman dari 30–45 hari menjadi 10–15 hari menghadirkan alternatif nyata terhadap ketergantungan pada Selat Malaka yang selama ini menjadi sumber utama kerentanan strategis Tiongkok. Pengembangan Pelabuhan Gwadar sebagai jangkar strategis di Samudra Hindia memberikan akses langsung ke sumber energi Timur Tengah yang memasok sekitar 52% kebutuhan energi Tiongkok. Secara paralel, transisi bertahap dari portofolio energi yang didominasi bahan bakar fosil pada Fase I menuju bauran energi

terbarukan yang semakin besar pada Fase II membangun fondasi sistem pasokan yang lebih tahan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan geopolitik.

Kedua, dalam *security of demand*, penelitian ini menemukan bahwa dimensi ini secara konseptual tidak relevan bagi Tiongkok yang berposisi struktural sebagai konsumen dan bukan produsen energi dalam sistem energi global. Ketiadaan upaya *security of demand* bukan merupakan kekurangan dalam strategi Tiongkok, melainkan cerminan logis dari posisinya sebagai importir minyak terbesar kedua di dunia sejak tahun 1993. Kondisi ini menjadikan dimensi-dimensi lain dalam kerangka Zha jauh lebih relevan dan operasional untuk menganalisis kepentingan energi nasional Tiongkok melalui CPEC.

Ketiga, dalam *security as availability*, Tiongkok berupaya memastikan bahwa energi yang tersedia secara geologis dapat benar-benar dijangkau dan didistribusikan secara andal melalui tiga jalur. Jalur pertama adalah perluasan infrastruktur akses fisik berupa jaringan pipa dan transmisi sepanjang koridor, jalur kedua adalah diversifikasi kapasitas pembangkit yang menciptakan surplus yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan strategis, dan jalur ketiga adalah pembangunan cadangan operasional sebesar $\pm 10-15$ juta barel di Pelabuhan Gwadar dan sepanjang rute pipa. Fondasi infrastruktur yang dibangun membuka potensi ketersediaan energi yang besar, meskipun belum sepenuhnya beroperasi pada kapasitas penuh hingga tahun 2025 sehingga dampaknya masih bersifat potensial dan terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Keempat, dalam *security as affordability*, Tiongkok secara terencana berupaya menekan biaya distribusi energi ke wilayah barat, khususnya Provinsi Xinjiang, melalui jalur Gwadar-Kashgar yang memangkas jarak distribusi 1.000–

2.000 km dibandingkan rute konvensional dari pantai timur. Upaya ini berkontribusi pada penurunan rasio beban energi masyarakat miskin Xinjiang dari lebih dari 15% menjadi sekitar 8–10% dalam periode yang bersamaan dengan pembangunan CPEC. Namun, dampak langsung terhadap harga energi secara nasional tetap terbatas karena mekanisme penetapan harga yang tersentralisasi oleh NDRC menjadi variabel yang jauh lebih dominan, sehingga fondasi struktural yang sedang dibangun melalui koridor ini merupakan prasyarat bagi tercapainya *security as affordability* yang sesungguhnya di masa mendatang.

Kelima, dalam *security as sustainability*, Tiongkok menjalankan transformasi portofolio energi yang tidak linear namun konsisten arahnya. Fase I (2015-2020) yang didominasi pembangkit batu bara mencerminkan tekanan kebutuhan jangka pendek Pakistan yang tidak dapat sepenuhnya dikompromikan dengan prinsip keberlanjutan, sementara Fase II (2020-2025) yang secara penuh berorientasi pada energi terbarukan mencerminkan pematangan strategi keberlanjutan yang semakin sejalan dengan target netralitas karbon Tiongkok pada tahun 2060. Tantangan utama yang masih harus diselesaikan adalah kontrak *Power Purchase Agreement (PPA)* batu bara pada Fase I yang berdurasi 25–30 tahun, yang berpotensi bertabrakan dengan komitmen dekarbonisasi jangka panjang dan membutuhkan mekanisme pensiun dini yang adil secara ekonomis bagi kedua pihak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa CPEC bukan sekadar proyek infrastruktur bilateral atau inisiatif ekonomi regional, melainkan merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang integral dalam strategi keamanan energi nasional Tiongkok. CPEC tidak dapat dinilai sebagai solusi tunggal yang

sempurna atas kerentanan energi Tiongkok, melainkan sebagai arsitektur strategis jangka panjang yang terus berkembang. Kontribusinya terhadap keamanan energi nasional Tiongkok akan semakin kuat seiring dengan beroperasinya seluruh infrastruktur koridor secara penuh di masa mendatang, menjadikan CPEC sebagai salah satu manifestasi paling komprehensif dari strategi keamanan energi multidimensi yang pernah dijalankan Tiongkok dalam konteks sistem internasional yang semakin kompleks dan kompetitif.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Saran-saran ini dirumuskan dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian yang ada sekaligus peluang pengembangan kajian yang lebih mendalam di masa mendatang. Harapannya, saran-saran ini dapat memberikan manfaat baik bagi kalangan akademisi maupun para pembuat kebijakan yang relevan.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan data sekunder sehingga terdapat keterbatasan dalam mengakses perspektif aktor-aktor langsung yang terlibat dalam implementasi CPEC. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, pelaku industri energi, maupun pakar kebijakan energi dari kedua negara guna memperoleh perspektif yang lebih kaya dan data yang lebih terverifikasi. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat memperluas cakupan analisis dengan membandingkan strategi keamanan energi Tiongkok melalui CPEC dengan proyek-proyek BRI lainnya seperti koridor

ekonomi Tiongkok-Myanmar (CMEC) atau koridor minyak dari Asia Tengah, guna membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola umum strategi energi internasional Tiongkok. Penggunaan kerangka konseptual alternatif atau kombinasi dari beberapa teori hubungan internasional juga dapat dipertimbangkan untuk menghasilkan analisis yang lebih multidimensi dan memperkaya kontribusi akademik di bidang studi keamanan energi.

Bagi pembuat kebijakan di Indonesia, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki posisi geografis strategis seperti Indonesia yang menguasai jalur Selat Malaka perlu memahami bahwa investasi infrastruktur berskala besar dari Tiongkok dalam kerangka BRI tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi murni, melainkan sarat dengan kepentingan strategis keamanan energi jangka panjang. Pemahaman ini penting untuk merumuskan posisi tawar yang lebih kuat dalam setiap negosiasi kerja sama infrastruktur dan energi dengan Tiongkok, serta dalam membangun kebijakan pengelolaan jalur-jalur maritim strategis yang berdimensi keamanan nasional. Di sisi lain, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model CPEC dalam merumuskan strategi diversifikasi energi dan pembangunan infrastruktur energi nasional yang terintegrasi dengan kepentingan geoekonomi regional, sehingga posisi strategis Indonesia sebagai penjaga jalur maritim global dapat dimanfaatkan secara optimal dalam diplomasi energi internasional.